

Kelompok Rawan Penularan Cacar Monyet Akan Diawasi Ketat

JAKARTA (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memerintahkan Dinas Kesehatan serta jajarannya untuk mengawasi ketat kelompok yang rawan menularkan penyakit cacar monyet.

Hal tersebut disampaikan Heru usai dirinya meninjau rehabilitasi gedung kantor Kelurahan Palmeriam, Kamis (2/11).

"Maka di Jakarta kita tracing terus," jelas Heru.

Heru menyebutkan kenaikan kasus cacar monyet di Jakarta sebagai hal yang harus menjadi perhatian serius.

"Meningkatpun ada yang memang harus divaksin, ada yang memang terindikasi, semuanya kita lokalisasi," tambahnya.

Perihal cakupan untuk vaksin cacar monyet disebut Heru akan terus ditingkatkan.

"Ya mereka (suspek) akan kita berikan vaksinasi. Nanti ada Dinas Kesehatan

yang menangani prosesnya," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui seluruh pasien positif cacar monyet pada umumnya merupakan laki-laki usia produktif antara 25-50 tahun.

Meskipun awalnya berasal dari luar negeri, hasil penelusuran Kementerian Kesehatan RI diketahui 6 pasien Monkeypox juga merupakan Orang Dengan HIV (ODHIV), dan memiliki orientasi Biseksual.

Penderita cacar monyet diketahui pada umumnya memiliki faktor perilaku seks beresiko (homo seksual dan seks bebas) dengan ciri-ciri muncul lesi dan ruam kemerahan, dan diikuti dengan demam, pembesaran kelenjar getah bening, nyeri tenggorokan, myalgia, ruam, dan sulit menelan.

Penularan terjadi dari manusia ke manusia karena kontak langsung dengan cairan tubuh atau lesi kulit orang yang terinfeksi. ● yan

Masih Tahap Renovasi, Gedung TK dan SD Sumbangsih Terbakar

JAKARTA (IM) - Gedung TK dan SD Sumbangsih di Jalan Duren Bangka yang terbakar Rabu malam ternyata masih dalam tahap renovasi.

Paramita, Ketua Yayasan Sumbangsih mengatakan, renovasi dilakukan karena beberapa bagian gedung dinilai sudah usang.

"Iya ceritanya kan bangunan ini sudah lama, ya. Jadi rangka atap itu baru saja diganti dengan baja ringan. Lalu yang dulunya asbes diganti pakai seng gitu," ujar dia kepada wartawan di lokasi, Kamis (2/11) dini hari.

Walau demikian, Paramita mengatakan, peremajaan atap baru dilakukan di gedung TK saja. Khusus gedung SD, peremajaan masih dalam proses penggantian.

"Jadi bertahap memang. Kalau yang TK ini sebenarnya sudah selesai renovasi. Selain atap, plafon-plafon yang tadinya turun atau rusak juga sudah selesai diganti, baru saja selesai. Kalau gedung SD memang belum selesai semua, hanya sebagian kecil yang sudah diganti," tutur dia.

Sebagai informasi, kebakaran melanda gedung TK dan SD Sumbangsih pada

Rabu (1/11) sekitar pukul 22.43 WIB. Si jago merah mulai menyala hebat sekitar pukul 23.00 WIB. Kobaran api membumbung tinggi dan membakar material bangunan yang mudah terbakar.

Salah satu sudut bangunan yang terbakar hebat terletak di bagian atap, terutama atap gedung SD. Kerangka atap gedung SD yang disinyalir masih menggunakan kayu dan dilapisi dengan seng membuat api dengan mudah merambat.

Akibatnya, sekitar pukul 23.30 WIB, api sudah melahap habis seluruh bagian atap gedung SD yang bangunannya memiliki tinggi dua lantai. Sementara, material yang terbakar seperti kayu, seng, dan asbes, terlihat berjatuhan ke lantai dasar satu per satu. Material itu kemudian menimbulkan bunyi yang nyaring saat menentuhkan lantai dasar.

Setelah tiga jam lebih berjibaku dengan si jago merah, pemadam kebakaran akhirnya mampu memastikannya bahwa api benar-benar padam sekitar pukul 03.00 WIB. Dalam peristiwa ini, total ada 17 unit mobil yang dikerahkan dengan personel berjumlah 70 orang. ● yan

Soal Kenaikan UMP, Pemprov DKI Tunggu Revisi UU Cipta Kerja

JAKARTA (IM) - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta menunggu revisi Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) terkait tuntutan kenaikan sebesar 15 persen Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024.

Kepala Disnakertrans DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan, penetapan UMP didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ia juga menegaskan, bahwa pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang tentang Ciptaker yang mengatur soal upah.

"Dengan telah ditetapkannya Perpu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 oleh MK (Mahkamah Konstitusi), maka aturan pelaksanaan yang diatur dalam PP 36/2021 perlu direvisi dan saat ini masih dalam proses di Kemenaker," kata Hari saat dikonfirmasi, Kamis (2/11).

Ia menyebut, ada tiga

komponen yang mengatur penetapan UMP. Yaitu Inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu. Tiga komponen itu saat ini masih dalam proses pembahasan pemerintah pusat.

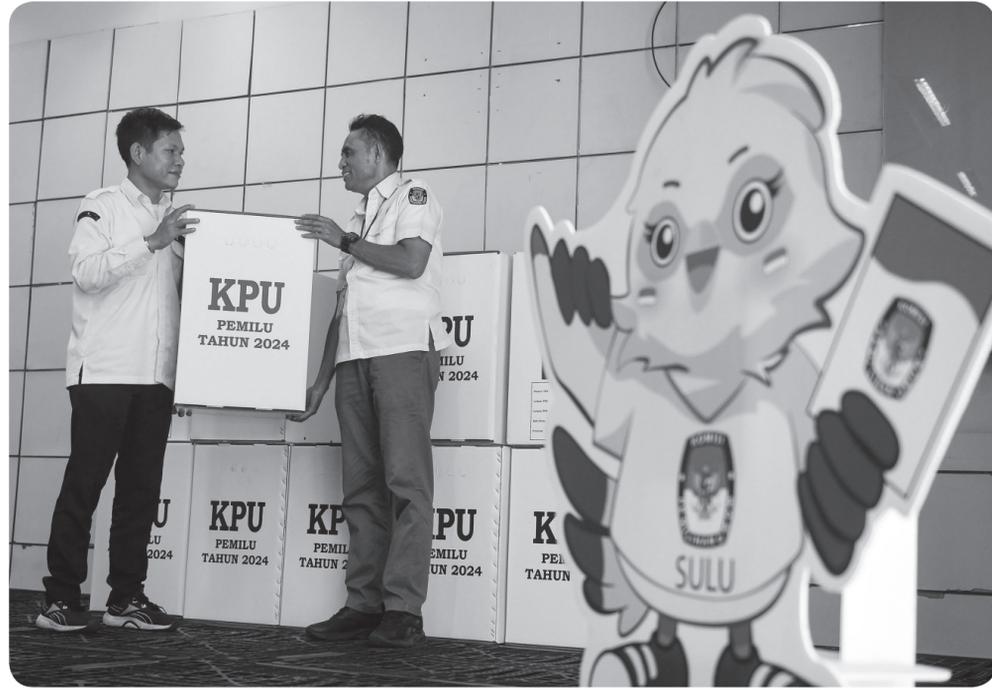
"Kita akan melihat dari komponen-komponen yang menjadi dasar dalam regulasi penetapan UMP, yaitu hasil revisi PP 36/2021," ujar Hari.

Hari mengatakan, Disnakertrans DKI Jakarta akan melihat terlebih dahulu apakah angka-angka dalam komponen tuntutan pekerja atau buruh itu sesuai dengan tiga komponen atau tidak. Kelompok buruh terus mendesak agar UMP DKI Jakarta pada 2024 bisa naik hingga 15 persen.

Sementara, menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, Pendapatan Nasional Bruto atau GNI per kapita Indonesia di kisaran 4.500 dolar AS atau setara upah Rp 5,6 juta per bulan. Sehingga, kata dia, dengan hitungan itu UMP DKI Jakarta harusnya sudah naik hingga Rp700.000 per bulan. ● yan

4 | Metropolis

FOTO/ANTARA



DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU 2024 DI JAKARTA

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Pusat Efniadiyansyah (kiri) menyerahkan kotak suara Pemilu 2024 kepada salah satu stafnya di Gudang KPU Jakarta Pusat, Sawah Besar, Jakarta, Kamis (2/11). KPU DKI Jakarta mulai mendistribusikan logistik tahap pertama berupa bilik suara, kotak suara, dan tinta untuk Pemilu 2024 dengan target selesai pada 10 November 2023.

BANYAK RENOVASI BANGUNAN YANG TAK SESUAI SPEK Heru Budi 'Semprot' Lurah Palmeriam Jaktim

Heru mengatakan ke depannya dia bakal kembali melakukan pengecekan langsung ke kelurahan maupun sekolah yang tengah melakukan renovasi.

JAKARTA (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Kelurahan Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur. Heru mengecek langsung progres renovasi gedung kelurahan itu.

Pantauan di lokasi, Ka-

mis (2/11), Heru tiba pukul 08.00 WIB. Kedatangannya langsung disambut oleh Lurah Palmeriam Setiyawan.

Sesampai di lokasi, Heru langsung memperhatikan bagian lobi bangunan itu. Mimik wajah Heru tampak tak senang dengan beberapa bagian di ruangan itu.

Sambil berbicara dengan Setiyawan, Heru terlihat beberapa kali menunjuk ke arah

AC dan guiding block yang dipasang hingga ke dalam ruangan.

"AC-nya nggak pernah dirawat," kata Heru kesal.

Heru kemudian berbicara mengenai besaran arus listrik di kantor tersebut. Dia meminta Setiyawan secepatnya menaikkan besaran arus listrik di kantor kelurahan yang tengah direnovasi itu.

"Pak lurah, panggil kontraktornya minta hari ini dinaikin daya. Masa kayak gini harus diajarin. Bapak bawa RAB, RAB daya suruh naik, bapak naikin dong," cecar Heru.

"Jangan bilang cukup-cukup. Cukupnya dari mana. Nanti karyawan bapak pasang kulkas, pasang rice cooker, pasang macem-macam, daya nggak naik, ribut lagi, saya nggak bisa pak," sambungnya.

Heru lantas meminta Setiyawan mengecek kembali rencana pembangunan yang telah disepakati.

Dia mengatakan bakal menagih kembali perkembangan kenaikan daya listrik itu hari ini.

"Kesempatan untuk bangun kantor kelurahan hari ini, 10 tahun lagi bapak belum tentu bisa perbaiki dengan waktu yang terbatas," tegas Heru.

"Bapak panggil hari ini, siang saja telepon, masang daya besok pagi," tagihnya.

Heru melanjutkan sidaknya dengan menjajaki ruangan demi ruangan pada bangunan tiga lantai tersebut. Dia memperhatikan tiap detail pada bangunan itu mulai struktur bangunan hingga kerusakan kecil pada tembok ataupun material lainnya.

"Banyak yang harus diper-

baiki. Perbaiki, terus posisi spek yang harus disempurnakan," kata Heru menjawab awak media yang bertanya soal hasil sidak.

Heru menuturkan, vendor bangunan bersedia bertanggung jawab dan akan memperbaiki kerusakan yang ada. Heru memberi tenggat waktu tiga untuk perbaikan bangunan itu.

"Nggak (akan di-blacklist), vendornya mau memperbaiki kok. Bu Kabag bakal mengawasi itu. Kan mereka siap untuk janji perbaikan," sebut Heru.

Heru mengatakan ke depannya dia bakal kembali melakukan pengecekan langsung ke kelurahan maupun sekolah yang tengah melakukan renovasi. Namun Heru tak merinci detail lokasi mana saja yang bakal disidaknya ke depan.

"Ini pertama, nanti besok saya dengan pak inspektur ke sekolah, semua. Ada (list-nya), inspektur keliling kita," kata Heru.

Diketahui renovasi Kantor Kelurahan Palmeriam dimulai pada Agustus tahun ini dan direncanakan rampung pada Desember.

Adapun renovasi itu menghabiskan anggaran sebesar Rp 3,8 miliar.

"Tadi sudah sidak oleh Pak PJ Gubernur, dari direktorat nanti dari pelaksana akan memperbaiki apa yang kurang tadi menjadi catatan," ucap Lurah Palmeriam, Setiyawan.

Dia mengaku pembangunannya kantor kelurahan itu memang belum rampung. Kendati begitu dia menyatakan akan memperbaiki seluruh catatan yang diberikan Heru. ● yan

Penutupan TPS Liar di Depok Tak Kunjung Capai Titik Terang

DEPOK (IM) - Penutupan tempat pembuangan sampah (TPS) liar di Limo, Depok tidak kunjung mencapai titik terang. Padahal, keberadaan TPS liar ini telah berdampak buruk bagi kesehatan dan menyebabkan polusi udara akibat kebakaran seperti yang terjadi pada Minggu (22/10) lalu.

Sejak TPS liar itu terbakar, tuntutan penutupan kembali bergema. Sekretaris Daerah Kota Depok, Supian Suri menegaskan tidak ada lagi toleransi untuk TPS liar.

"Harus ditutup, tidak ada koordinasi lagi, benar-benar ditutup," kata Supian di Mapolres Metro Depok, Kamis (26/10) lalu.

Namun, sudah lebih dari 10 hari sejak pernyataan tersebut, belum ada lagi kabar kapan TPS liar Limo dan TPS liar lainnya akan ditutup. Menanggapi ini, Satpol PP Kota Depok selaku eksekutor mengaku sedang menunggu instruksi dari DLHK

Kota Depok. "Harus duduk bareng dulu semuanya dari pihak kelurahan, kecamatan, Dinas Kebersihan. Kalau kami kan eksekutor terakhir," kata Kepala Satpol PP Kota Depok, Mohamad Thamrin, Kamis (2/11).

Thamrin berujar, penutupan TPS liar harus mengikutinya prosedur, termasuk peringatan 1, 2, dan 3 yang dikeluarkan oleh DLHK kepada pengelola TPS liar tersebut.

"Pertama itu karena izin pengelolaannya ada di DLHK, ya DLHK dulu. Ya memang langkah terakhirnya ada di Pol PP, tapi semua langkah awalnya, apakah itu teguran 1, 2, 3, berita acara teguran, semua itu dilakukan dulu sama DLHK," tutur Thamrin.

Setelah itu semua dilakukan, tetapi pengelola TPS liar tidak mengindahkannya, maka Satpol PP akan bertindak sesuai instruksi DLHK. "Kan tahapan Penda seperti itu, enggak bisa lang-

sung ditutup. Jika tahapan itu sudah dilakukan, maka DLHK ya bikin surat, bahwa 'kami sudah melakukan penutupan tanggal sekian, bukti terlampir. Dan untuk selanjutnya kami mohon dilakukan penutupan atau penghentian,'" ucap dia.

Perlu diingat lagi, tidak semua tanah yang menjadi lokasi TPS liar adalah tanah yang jelas kepemilikannya, termasuk TPS liar Limo yang berada di atas lahan sengketa. Kendati demikian, kata Thamrin, izin pengelolaan sampah ada di ranah DLHK. Jika suatu TPS tidak memiliki izin pengelolaan, maka DLHK pula yang berhak memberikan teguran hingga mengeluarkan instruksi untuk penyevelan.

"Iya, harusnya DLHK yang menindak itu. Terkait dengan izin pengolahannya, kalau dia izin pengolahannya enggak ada, harusnya dia bikin teguran, izin untuk penyevelan," ungkap Thamrin. ● yan

'Soft Launching' HPN 2024 di Bundaran HI 12 November



JAKARTA (IM) - Rapat persiapan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 yang dihadiri Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dan Sekjen PWI Sayid Iskandarsyah, dijadwalkan "soft launching" HPN di Bundaran Hotel Indonesia (HI) tanggal 12 November 2023 mendatang. Untuk itu, Hendry mengajak wartawan beramai-ramai memperkenalkan HPN 2024 kepada masyarakat.

"Soft launching HPN

2024 diadakan untuk memperkenalkan Hari Pers Nasional kepada masyarakat. Saya mengajak wartawan meramaikan acara itu. Kita akan membentangkan spanduk dan jalan sehat di Bundaran HI," ujar Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun di Kantor PWI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (1/11).

HPN 2024 mendatang adalah HPN pertama Kepengurusan PWI Pusat di bawah kepemimpinan Hendry Ch

Bangun. Puncak acara HPN 2024 akan berlangsung tanggal 9 Februari 2024 di Taman Impian Jaya Ancol (TIJA), Jakarta.

Dalam rapat yang dipimpin Wasekjen PWI Pusat, Raja Pane dibahas pula berbagai persiapan acara-acara HPN yang kali ini mengusung tema "Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Keutuhan Bangsa".

Hendry berpendapat promosi HPN 2024 harus digen-

carkan, baik lewat pemberitaan di media massa maupun konten-konten di media sosial dengan berbagai platform, seperti Youtube, podcast, Twitter, Instagram, video-video pendek, live streaming dan sebagainya.

"Kita ingin HPN kali ini berbeda dan gaung-nya makin kuat," tambahnya.

Salah satu acara HPN 2024 yang akan ditayangkan secara "live streaming" adalah dialog kebangsaan yang akan

menampilkan tiga pasang capres-cawapres.

Hendry mengatakan, dialog kebangsaan itu penting sekaligus untuk menunjukkan jatidiri PWI Merah Putih, yakni organisasi profesi wartawan yang berwawasan kebangsaan dan terus mempromosikan nilai-nilai keberagaman dan perjuangan bangsa Indonesia.

Diharapkan penyelenggaraan HPN 2024 juga memberikan inspirasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lain melalui penghargaan Anugerah PWI. Penghargaan ini akan diberikan kepada beberapa tokoh muda yang telah berjasa kepada lingkungan, Pendidikan dan UMKM.

Rapat Persiapan HPN 2024 juga menyepakati perlunya memberikan Pena Emas kepada tokoh masyarakat yang dinilai berjasa kepada bangsa negara serta memberikan perhatian untuk kemajuan dunia pers.

"Kita juga harus memperhatikan usulan dari daerah-daerah. Pena Emas itu usulan dari daerah," tambah Hendry. ● ber

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan adanya kesalahan tentang penerbitan iklan dikoran tentang pembubaran PT Nusantara Raja Vape, atas pencantuman nama dan kontak pribadi tuan Adi Saputra, dengan ini kami meminta maaf atas kesalahan informasi iklan tersebut.

Demikian permohonan maaf kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

PENGUMUMAN

Mendinkanaljuri hasil Akta Pernyataan Keputusan Sirukuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT GAMMA KALIMANTAN tanggal 26 Desember 2022 Nomor 04 yang dibuat di hadapan HERU SISWANTO, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Tangerang perihal pembubaran PT GAMMA KALIMANTAN (Dalam Likuidasi) yang berkedudukan di Kabupaten Kapuas Hulu dan dilanjutkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirukuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT GAMMA KALIMANTAN (Dalam Likuidasi) tanggal 02 November 2023 Nomor 02, yang dibuat di hadapan HERU SISWANTO, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Tangerang perihal Laporan Pertanggungjawaban Likuidator atas Hasil Akhir Proses Likuidasi, maka dengan ini Likuidator mengumumkan bahwa:

Proses Likuidasi PT GAMMA KALIMANTAN telah selesai sepenuhnya dan dengan ini dinyatakan telah DIKUKUDASI LIKUIDATOR